



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2024



dishub@bangkalankab.go.id



031 - 3097441



@BangkalanDishub



dishub_bangkalan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

DINAS PERHUBUNGAN

Tahun 2024



DINAS PERHUBUNGAN

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DINAS PERHUBUNGAN merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DINAS PERHUBUNGAN. Kinerja DINAS PERHUBUNGAN diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan DINAS PERHUBUNGAN pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangkalan, 17 Januari 2024

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKALAN



AKHMAD RONTYUN HAMID, S.T., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197311302002121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Realisasi Anggaran	41
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, DINAS PERHUBUNGAN selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka

di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut DINAS PERHUBUNGAN diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

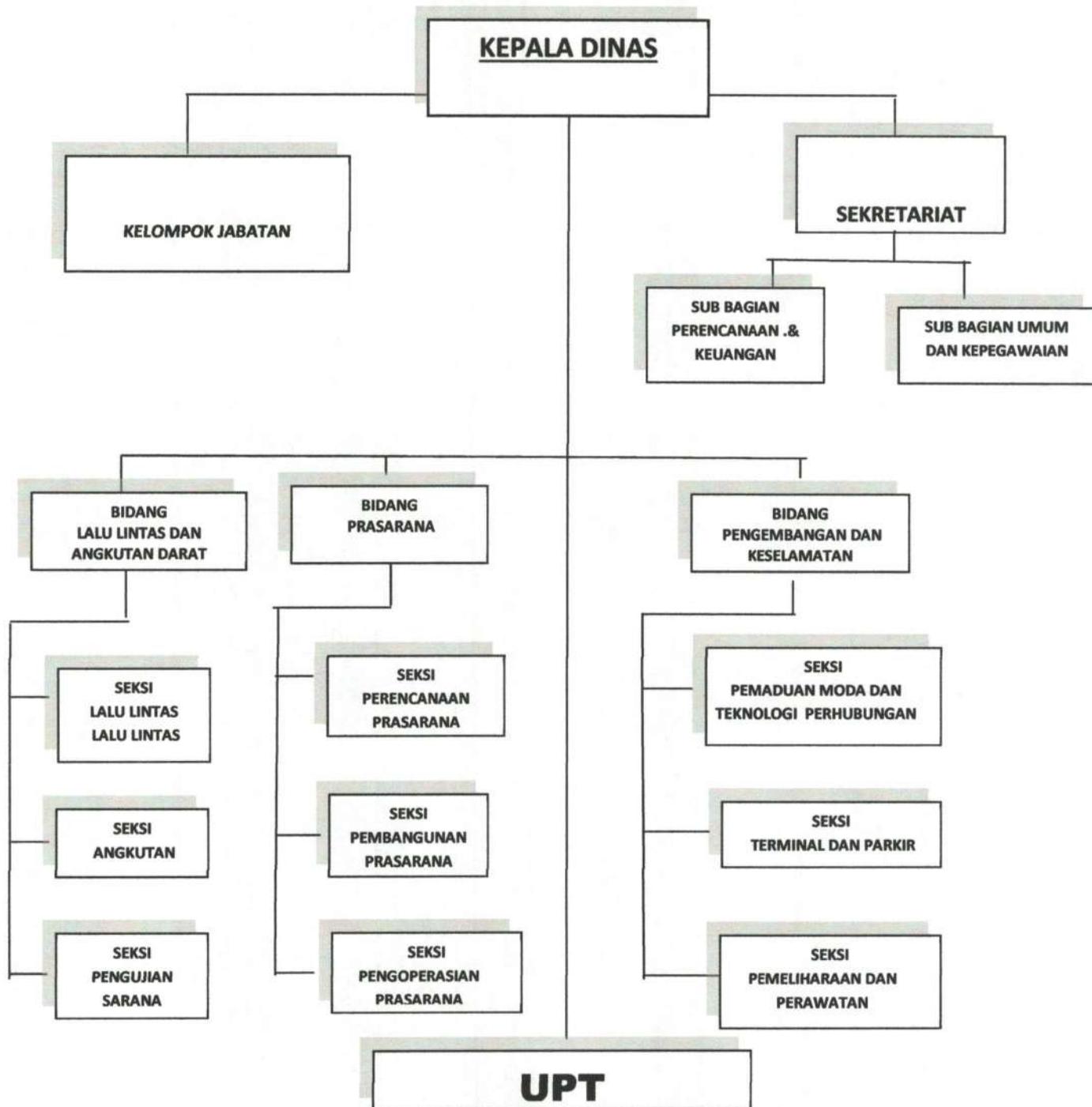
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah bidang perhubungan.
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang perhubungan.
- c. pelaksanaan administrasi dinas daerah bidang perhubungan.
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi/Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi DINAS PERHUBUNGAN .

Gambar 1.1.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKALAN



Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra DINAS PERHUBUNGAN periode 2024-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan di bidang pelayanan publik :
 - a. Terbatasnya kualitas SDM khususnya di bidang pelayanan publik, standar kebutuhan SDM pada SPM belum seluruhnya terpenuhi;
 - b. Belum tersusunnya standar pelayanan sebagai acuan pelayanan instansi kepada masyarakat;
 - c. Belum terbentuknya budaya pelayanan prima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan;
2. Isu koordinasi antar pihak terkait :
 - a. Koordinasi antar instansi pemerintah dan unsur terkait belum dilakukan secara maksimal;
 - b. Belum maksimalnya kerjasama dalam hal bantuan dan pembiayaan sektor untuk menggai sumber pembiayaan sebagai solusi atas terbatasnya anggaran;
3. Isu pelayanan angkutan :
 - a. Belum optimalnya pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan rendahnya tingkat keterisian penumpang angkutan;
 - b. Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan simpul-simpul angkutan (terminal dan halte/shelter) ditandai dengan masih terbatasnya jumlah fasilitas halte/shelter dan belum maksimalnya pengelolaan terminal;
 - c. Belum maksimalnya pengawasan dan pembinaan pada angkutan moda daerah, belum adanya standar perlengkapan keselamatan;

- d. Belum optimalnya fasilitas layanan bus angkutan umum untuk penumpang perempuan, lansia dan disabilitas (semisal tangga undakan, bidang miring/selasar dan kursi khusus untuk ibu menyusui);
4. Isu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas :
 - a. Terjadinya kemacetan temporer pada ruas – ruas jalan protokol (jalan PB. Sudirman SMP – SMA 1 Bangkalan), khususnya pada saat jam – jam sibuk berangkat dan pulang kantor/sekolah;
 - b. Masih tingginya kejadian kecelakaan yang diakibatkan faktor manusia akibat rendahnya disiplin dan tertib berlalu lintas khususnya pada kalangan pelajar;
 - c. Masih belum optimalnya peningkatan keselamatan dari sisi prasarana jalan yang diindikasikan dengan masih terbatasnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan;
 5. Isu pelayanan aduan penerangan jalan umum (PJU) :
 - a. Semakin banyaknya pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), biaya tagihan rekening listrik pasti bertambah;
 - b. Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) harus diimbangi dengan biaya pemeliharaan atau perbaikan jika terjadi kerusakan;
 6. Isu pelayanan parkir :
 - a. Belum optimalnya pelayanan pengelolaan parkir di Bangkalan

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra DINAS PERHUBUNGAN periode 2024-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan di bidang pelayanan publik :
 - a. Terbatasnya kualitas SDM khususnya di bidang pelayanan publik, standar kebutuhan SDM pada SPM belum seluruhnya terpenuhi;
 - b. Belum tersusunnya standar pelayanan sebagai acuan pelayanan instansi kepada masyarakat;
 - c. Belum terbentuknya budaya pelayanan prima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan;
2. Isu koordinasi antar pihak terkait :
 - a. Koordinasi antar instansi pemerintah dan unsur terkait belum dilakukan secara maksimal;

- b. Belum maksimalnya kerjasama dalam hal bantuan dan pembiayaan sektor untuk menggai sumber pembiayaan sebagai solusi atas terbatasnya anggaran;
3. Isu pelayanan angkutan :
- a. Belum optimalnya pelayanan angkutan yang diindikasikan dengan rendahnya tingkat keterisian penumpang angkutan;
 - b. Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan simpul-simpul angkutan (terminal dan halte/shelter) ditandai dengan masih terbatasnya jumlah fasilitas halte/shelter dan belum maksimalnya pengelolaan terminal;
 - c. Belum maksimalnya pengawasan dan pembinaan pada angkutan moda daerah, belum adanya standar perlengkapan keselamatan;
 - d. Belum optimalnya fasilitas layanan bus angkutan umum untuk penumpang perempuan, lansia dan disabilitas (semisal tangga undakan, bidang miring/selasar dan kursi khusus untuk ibu menyusui);
4. Isu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas :
- a. Terjadinya kemacetan temporer pada ruas – ruas jalan protokol (jalan PB. Sudirman SMP – SMA 1 Bangkalan), khususnya pada saat jam – jam sibuk berangkat dan pulang kantor/sekolah;
 - b. Masih tingginya kejadian kecelakaan yang diakibatkan faktor manusia akibat rendahnya disiplin dan tertib berlalu lintas khususnya pada kalangan pelajar;
 - c. Masih belum optimalnya peningkatan keselamatan dari sisi prasarana jalan yang diindikasikan dengan masih terbatasnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan;
5. Isu pelayanan aduan penerangan jalan umum (PJU) :
- a. Semakin banyaknya pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), biaya tagihan rekening listrik pasti bertambah;
 - b. Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jaan Umum (PJU) harus diimbangi dengan biaya pemeliharaan atau perbaikan jika terjadi kerusakan;
6. Isu pelayanan parkir :
- a. Belum optimalnya pelayanan pengelolaan parkir di Bangkalan

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja DINAS PERHUBUNGAN ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 TAHUN 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis DINAS PERHUBUNGAN adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini DINAS PERHUBUNGAN. Rencana Strategis DINAS PERHUBUNGAN yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 3 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis DINAS PERHUBUNGAN dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra DINAS PERHUBUNGAN tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra DINAS PERHUBUNGAN telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra DINAS PERHUBUNGAN merupakan hasil kesepakatan bersama antara DINAS PERHUBUNGAN dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra DINAS PERHUBUNGAN tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja DINAS PERHUBUNGAN dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah . Visi Kabupaten Bangkalan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 adalah:

“Mewujudkan Masyarakat Bangkalan yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya”

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 tersebut diatas maka dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Membangun Infrastruktur
2. Ekonomi Berkeadilan, dan
3. Berdaya Saing

Perumusan tujuan dan sasaran DINAS PERHUBUNGAN, dimana tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan ditetapkan berdasarkan Sasaran RPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan adalah **“Mewujudkan Tata Kelola Perhubungan yang Baik”** sedangkan sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah **“Meningkatnya kualitas layanan perhubungan”**.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Tahun 2024-2026 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target DINAS PERHUBUNGAN sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
DINAS PERHUBUNGAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	2.1 Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik	a. Persentase Capaian Operasional dan Ketertiban LLAJ	60	80	90
			b. Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan	50	75	80
			c. Persentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan	60	75	80
		2.2 Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.85	81.99	82.13

Sumber : Renstra DINAS PERHUBUNGAN periode 2018-2023

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama DINAS PERHUBUNGAN tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
DINAS PERHUBUNGAN

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
<p>Tujuan : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan</p> <p>Sasaran: Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU,Perlengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik</p>	<p>A. Prosentase Infrastruktur Perhubungan yang berfungsi dengan baik</p> <p>A. Persentase Capaian Operasional dan Ketertiban LLAJ) berfungsi dengan baik.</p> <p>B. Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan</p> <p>C. Persentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan</p>	<p>a. Perbandingan Capaian Operasional dan ketertiban yang dilaksanakan terhadap rencana kebutuhannya</p> <p>b. Perbandingan kebijakan yang dilaksanakan terhadap kebijakan yang dibuat</p> <p>c. Perbandingan pemanfaatan kelengkapan jalan terhadap kelengkapan jalan yang sudah di bangun</p>	<p>A. Jumlah keseluruhan infrastruktur dikurangi Jumlah Infrastruktur yang rusak dibagi Jumlah Komponen Infrastruktur yang teranggarkan x 100%</p> <p>A. Realisasi Jumlah Monev Parkir/LLAJ+Jumlah Pengelolaan Adm.Parkir/LLAJ+Jumlah Ketertiban PAM Parkir/LLAJ dibagi Jumlah Keseluruhan Operasional dan Ketertiban X 100%</p> <p>B. Realisasi Jumlah Kebijakan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Kebijakan yang direncanakan X 100%</p> <p>C. Realisasi Jumlah Kelengkapan yang dimanfaatkan dibagi Jumlah Kelengkapan Jalan yang dibangun X 100%</p>	<p>1. Laporan Realisasi Kegiatan Fisik</p>	<p>① UPTD</p> <p>② Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan Perhubungan</p>

Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perhubungan	Kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan Dinas Perhubungan	1. Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No. KEP / 25.M.PAN / 2 / 2004 tentang survey kepuasan Masyarakat	1. Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat
--	--	--	---	---	-------------

Sumber : Indikator Kinerja Utama DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024

TUJUAN OPD					SASARAN						
Uraian	Indikator	FORMULA	Target			URAIAN	INDIKATOR	FORMULA	Target		
			2024	2025	2026				2024	2025	2026
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan yang berfungsi dengan baik	Prosentase Infrastruktur Perhubungan yang berfungsi dengan baik	$\frac{\sum \text{Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang}}{\sum \text{Kebutuhan Sarana Prasarana Perhubungan}} \times 100\%$	83,43%	86,53%	88,07%	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perengko dan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik	Persentase Capaian Operasional dan Keterliban (LAJ)	$\frac{\sum \text{Manev Teriaksana Parkir \& LLAJ} + \sum \text{Pengelolaan Adm Parkir} + \sum \text{Ketrliban PAM Parkir} + \sum \text{LLAJ}}{\sum \text{Keseluruhan Operasional dan Keterliban}} \times 100\%$	80%	80%	90%
						Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perengko dan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik	Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan	$\frac{\sum \text{Kebijakan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Kebijakan yang di buat}} \times 100\%$	50%	75%	80%
						Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perengko dan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik	Persentase Pemanfaatan Perlempapan Jalan	$\frac{\sum \text{Kelengkapan jalan di manfaatkan}}{\sum \text{Kelengkapan jalan terbangun}} \times 100\%$	60%	75%	80%
						Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Dinas Perhubungan	81,85 indeks	81,99 indeks	82,13 indeks

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 31 bulan 10 tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala DINAS PERHUBUNGAN telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan Kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik	Prosentase sarana dan prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU) berfungsi dengan baik	90.48
		Prosentase Sarana dan Prasarana Perlengkapan Jalan berfungsi dengan baik	66.6
		Prosentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Lainnya (Terminal) berfungsi dengan baik	100
2	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.85

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan DINAS PERHUBUNGAN:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.85
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1

1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	100
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112
2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	100
3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana aparatur yang menunjang Tupoksi SKPD	100
6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5
6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6

6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4
6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan Jasa penunjang operasional OPD	100
8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3
8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100
9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8
9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1
9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik	78.33
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	80
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	80
2.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	100
4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12
6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	100
1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	1

3	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	13
14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang layak fungsi	100
14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS PERHUBUNGAN selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS PERHUBUNGAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi DINAS PERHUBUNGAN .

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini DINAS PERHUBUNGAN dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama DINAS PERHUBUNGAN.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, DINAS PERHUBUNGAN juga melakukan

revisi terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan revisi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama DINAS PERHUBUNGAN tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase infrastruktur perhubungan yang berfungsi dengan baik	83.43%	80%	95.89%	Sangat Tinggi	Renstra
2	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik	Prosentase capaian operasional dan ketertiban LLAJ	60%	50.76	84.6%	Tinggi	Renja
		Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan	50%	48.00	96%	Sangat Tinggi	Renja
		Persentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan	60%	60%	100%	Sangat Tinggi	Renja
3	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan bidang perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.85	83.99	102.61	Sangat tinggi	Renja

Uraian penjelasan tabel:

1. Target pada indikator Prosentase infrastruktur perhubungan yang berfungsi dengan baik untuk tahun 2024 adalah sebesar 83,43% dengan realisasi sebesar 80 % sehingga capaiannya sebesar 95,89 %
2. **sasaran meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik** dengan indikator kinerja prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik sebesar 60% dengan realisasi sebesar 50,76% sehingga capaiannya sebesar 84,6%. Maka sasaran berada pada kategori **"Tinggi"**.
3. **Sasaran meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik** dengan indikator kinerja persentase capaian pelaksanaan manajemen kebijakan pengembangan LLAJ dan keselamatan sebesar 50% dengan realisasi sebesar 48,00% sehingga capaiannya sebesar 96%. Maka sasaran berada pada kategori **"Sangat Tinggi"**.
4. **Sasaran meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik** dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan perlengkapan jalan sebesar 60% dengan realisasi sebesar 60% sehingga capaiannya sebesar 100%. Maka sasaran berada pada kategori **"Sangat Tinggi"**.
5. **Sasaran indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah** dengan target **81,85%** pada tahun 2024. Target tersebut diperoleh dari perkiraan kegiatan kesekretarian yang dilaksanakan yaitu 6 kegiatan dari total 6 kegiatan. Sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar **83,99 %** telah memenuhi target disebabkan karena kegiatan kesekretarian terlaksana 7 kegiatan. Dari hasil tersebut diperoleh nilai rata rata pencapaian sebesar **102,61 %** maka sasaran masih berada pada kategori **"sangat tinggi"**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase infrastruktur perhubungan yang berfungsi dengan baik	80%	80%	80%	83.43%	80%	95.89
2	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan, dan kebutuhan fasilitas lainnya) berfungsi dengan baik		76.76	78	80.39	56.67	52.92	93.53
		Prosentase capaian operasional dan ketertiban LLAJ				60	50.76	84.6%
		Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan				50	48.00	96%
		Persentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan				60	60%	100%
3	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.87	80	80	81.85	83.99	102.61

Uraian penjelasan tabel:

1. Indikator Kinerja "Prosentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik" yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 terealisasi 80%. Jika di bandingkan dengan Tahun 2024 terealisasi 80%.

2. Sasaran pertama **“Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan, dan kebutuhan fasilitas lainnya) berfungsi dengan baik “**. Adapun keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dari indikator yang telah ditetapkan yaitu Persentase Capaian Operasional dan Ketertiban LLAJ, Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan, Persentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan, pencapaian target pada indikator sasaran ini **“sangat berhasil”** dengan presentase pencapaian target sebesar **93,53%**. Dikarenakan pada tahun 2024 ada perubahan indikator kinerja atas nomenklatur baru, maka dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2023) yang memperoleh hasil capaian sebesar **102,63%** hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja dari tahun ke tahun berikutnya mengalami penurunan.
3. Sasaran kedua **“Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”** Adapun keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran ini dapat diukur dari indikator yang telah ditetapkan yaitu Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan. Pencapaian target pada indikator sasaran ini **“sangat berhasil”** dengan presentase pencapaian target sebesar **81,85%**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (Tahun 2022) sebesar **83,99%** dengan capaian indikator kinerja sebesar **102,61%** maka dapat disimpulkan bahwa capaian memenuhi target yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja dari tahun ke tahun berikutnya mengalami kenaikan capaiannya.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS PERHUBUNGAN periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase infrastruktur perhubungan yang berfungsi dengan baik	80%	83.43%	95.89
2	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik	a. Prosentase Capaian Operasional dan Ketertiban LLAJ berfungsi dengan baik	50.76	60	84.6
		b. Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan	48.00	50	96
		c. Persentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan	60	60	100
3	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.99	81.85	102.61

Uraian penjelasan tabel:

1. Indikator Kinerja **Prosentase infrastruktur perhubungan yang berfungsi dengan baik** pada tahun 2024 terealisasi sebesar 80 %. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 83.43 %, maka tingkat kemajuan kerjanya mencapai 95,89 %.
2. Indikator Kinerja **Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik** pada tahun 2024 terealisasi sebesar 50.76 %. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 60%, maka tingkat kemajuan kerjanya mencapai 84.6 %.
3. Indikator Kinerja **Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan** pada tahun 2024 terealisasi sebesar 48.00 %. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 50%, maka tingkat kemajuan kerjanya mencapai 96%.
4. Indikator Kinerja **Persentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan** pada tahun 2024 terealisasi sebesar 60 %. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 60%, maka tingkat kemajuan kerjanya mencapai 100 %.
5. Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** pada tahun 2024 terealisasi sebesar 83.99 %. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 81.85 %, maka tingkat kemajuan kerjanya mencapai 102.61 %.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosentase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	80		
2	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik	<p>a. Prosentase Capaian Operasional dan Ketertiban LLAJ berfungsi dengan baik</p> <p>b. Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan</p> <p>c. Persentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan</p>	<p>50.76</p> <p>48.00</p> <p>60</p>		
3	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	83.99		

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan	Prosetase infrastruktur perhubungan dalam kondisi baik	83.43	80	95.89	Meningkatkan pelayanan terkait infrastruktur perhubungan secara efektif dan efisien.	Meningkatkan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang sesuai standar.
2	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik	a. Prosentase Capaian Operasional dan Ketertiban LLAJ berfungsi dengan baik	60	50.76	84.6	<p>1. Adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran dan komitmen seluruh pihak untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan target kinerja.</p> <p>2. Kinerja dipenuhi dg pemenuhan anggaran, penyiapan SDM yg berkecimpung pada aspek sarpras (sertifikat), adanya kondisi khusus dari tokoh masyarakat dalam perbaikan sarpras, sarpras perhubungan berdasarkan musrenbang, melihat kebijakan sarpras dari pusat berkaitan dengan sarpras</p>	<p>1. Meningkatkan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang sesuai standar.</p> <p>2. Dibutuhkan pemeliharaan, penyempurnaan indikator kinerja di RPJMD lebih representatis, usulan ke kementerian perhubungan berupa DAK yg mengatur masalah pemeliharaan dan pengadaan sarpras perhubungan, termasuk Bantuan Keuangan Provinsi, usulan masyarakat melalui forum musrenbang</p>
		b. Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan	50	48.00	96		
		c. Persentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan	60	60	100		

						yg baik, menampung layanan perhubungan dengan responsif	
3	Meningkakan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81.85	83.99	102.61	<p>1. Peningkatan pelayanan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien.</p> <p>2. Kinerja dipenuhi dg pemenuhan anggaran, penyiapan SDM yg berkecimpung pada aspek sarpras (sertifikat), adanya kondisi khusus dari tokoh masyarakat dalam perbaikan sarpras, sarpras perhubungan berdasarkan musrenbang, melihat kebijakan sarpras dari pusat berkaitan dengan sarpras yg baik, menampung layanan perhubungan dengan responsif.</p>	<p>1. Pelayanan lebih ditingkatkan lagi</p> <p>2. Dibutuhkan pemeliharaan, penyempurnaan indikator kinerja di RPJMD lebih representatis, usulan ke kementerian perhubungan berupa DAK yg mengatur masalah pemeliharaan dan pengadaan sarpras perhubungan, termasuk Bantuan Keuangan Provinsi, usulan masyarakat melalui forum musrenbang</p>

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan tabel 3.6 diatas dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan kebutuhan

fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik pada tahun 2024 indikator yang tergolong sangat tinggi ada 2.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.61	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu	100	Menunjang
1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	Menunjang
1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	Menunjang
1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	Menunjang

1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	Menunjang
1.1.5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	Menunjang
1.1.6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 lap	Menunjang
1.1.7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 lap	Menunjang
1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100	Menunjang
1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 org/bln	Menunjang
1.2.2				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 lap	Menunjang

					Keuangan Akhir Tahun SKPD		
1.3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan barang milik daerah yang tersusun	100	Menunjang
1.3.1				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 lap	Menunjang
1.6				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana aparatur yang menunjang tupoksi SKPD	100	Menunjang
1.6.2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	Menunjang
1.6.4				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	Menunjang
1.6.5				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dok	Menunjang
1.6.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	Menunjang
1.8				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional OPD	100	Menunjang
1.8.1				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 lap	Menunjang

1.8.2				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 lap	Menunjang
1.9				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
1.9.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	Menunjang
1.9.2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	Menunjang
1.9.5				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 unit	Menunjang
2	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi	<p>a. Persentase Capaian Operasional dan Ketertiban LLAJ</p> <p>b. Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan</p> <p>c. Persentase Pemanfaatan</p>	<p>84.6</p> <p>96</p> <p>100</p>	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	<p>a. Persentase Capaian Operasional dan Ketertiban LLAJ</p> <p>b. Persentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ dan Keselamatan</p> <p>c. Persentase Pemanfaatan</p>	<p>60</p> <p>50</p> <p>60</p>	Menunjang

	dengan baik	Perlengkapan Jalan			Perlengkapan Jalan		
2.2				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	80	Menunjang
2.2.1				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	80 unit	Menunjang
2.2.2				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 unit	Menunjang
2.4				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Titik Parkir yang dikelola	100	Menunjang
2.4.1				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 lap	Menunjang
2.6				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan	100	Menunjang
2.6.1				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 lap	Menunjang
2.6.2				Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan	1 dok	Menunjang

				Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan		
2.6.3				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	13 lap	Menunjang
2.14				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum yang layak fungsi	100	Menunjang
2.14.1				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lap	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

1. Pada indikator **Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintah daerah** menunjukkan pencapaian 83.99% dari target 81.85%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 102.61%.
 - 1.1 Pada indikator Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peraturan yang dihasilkan menunjukkan pencapaian 100% dari target 100%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 96%
 - 1.1.1. Pada indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah menunjukkan pencapaian 3 dokumen dari target 3 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

- 1.1.2. Pada indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD menunjukkan pencapaian 1 dokumen dari target 1 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 1.1.3. Pada indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD menunjukkan pencapaian 1 dokumen dari target 1 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 1.1.4. Pada indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD menunjukkan pencapaian 1 dokumen dari target 1 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 1.1.5. Pada indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD menunjukkan pencapaian 1 dokumen dari target 1 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 1.1.6. Pada indikator Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD menunjukkan pencapaian 3 laporan dari target 3 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 1.1.7. Pada indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah menunjukkan pencapaian 2 laporan dari target 2 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 1.2 Pada indikator Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN menunjukkan pencapaian 100% dari target 100%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 99.19%
 - 1.2.1 Pada indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN menunjukkan pencapaian 112 orang/bln dari target 112 orang/bln, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
 - 1.2.2 Pada indikator Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD menunjukkan

pencapaian - laporan dari target 1 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar -

1.3 Pada indikator Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun menunjukkan pencapaian 100% dari target 100%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

1.3.1 Pada indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD menunjukkan pencapaian 12 laporan dari target 12 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

1.4 Pada indikator Persentase Sarana Aparatur yang Menunjang Tupoksi SKPD menunjukkan pencapaian 100% dari target 100%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 96.95%

1.4.1 Pada indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan menunjukkan pencapaian 5 paket dari target 5 paket, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

1.4.2 Pada indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan menunjukkan pencapaian 6 paket dari target 6 paket, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

1.4.3 Pada indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan menunjukkan pencapaian 4 dokumen dari target 4 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

1.4.4 Pada indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD menunjukkan pencapaian 25 laporan dari target 25 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

1.5 Pada indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Operasional OPD menunjukkan pencapaian 99.84% dari target 100%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 99.73%

1.5.1 Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan menunjukkan pencapaian 3 laporan dari target 3 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

- 1.5.2 Pada indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan menunjukkan pencapaian 6 laporan dari target 6 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 1.6 Pada indikator Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menunjukkan pencapaian 100% dari target 80%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 95.62%
- 1.6.1 Pada indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya menunjukkan pencapaian 8 unit dari target 8 unit, sehingga prosentase pencapaian sebesar 94.70%
- 1.6.2 Pada indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya menunjukkan pencapaian 1 unit dari target 1 unit, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 1.6.3 Pada indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi menunjukkan pencapaian 23 unit dari target 23 unit, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
2. Pada indikator **Prosentase Capaian Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Pengembangan LLAJ & Keselamatan** menunjukkan pencapaian 84.6% dari target 60%, indikator **Prosentase Capaian Operasional dan Ketertiban LLAJ** menunjukkan pencapaian 96% dari target 50%, indikator **Prosentase Pemanfaatan Perlengkapan Jalan** menunjukkan pencapaian 100% dari target 60% sehingga prosentase pencapaian ketiga indikator diatas sebesar 99.68%.
- 2.1 Pada indikator Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan menunjukkan pencapaian 80% dari target 80%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 99.72%
- 2.1.1 Pada indikator Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota menunjukkan pencapaian 80 unit dari target 80 unit, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 2.1.2 Pada indikator Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara menunjukkan pencapaian 1 unit dari target 1 unit, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

- 2.2 Pada indikator Persentase Titik Parkir yang dikelola menunjukkan pencapaian 100% dari target 100%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 99.54%
- 2.2.1 Pada indikator Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota menunjukkan pencapaian 12 laporan dari target 12 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 2.3 Pada indikator Persentase operasi ketertiban lalu lintas yang dilaksanakan menunjukkan pencapaian 100% dari target 100%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 96%
- 2.3.1 Pada indikator Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota menunjukkan pencapaian 1 laporan dari target 1 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 2.3.2 Pada indikator Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas menunjukkan pencapaian 1 dokumen dari target 1 dokumen, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 2.3.3 Pada indikator Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota menunjukkan pencapaian 13 laporan dari target 13 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%
- 2.4 Pada indikator Persentase angkutan umum yang layak fungsi menunjukkan pencapaian 100% dari target 100%, sehingga prosentase pencapaian sebesar 94.71%
- 2.4.1 Pada indikator Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota menunjukkan pencapaian 1 laporan dari target 1 laporan, sehingga prosentase pencapaian sebesar 100%

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.875.880.010	12.780.312.997	99.25
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.372.150	5.157.000	96
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.162.689.260	8.096.264.533	99.19
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	695.000	695.000	100
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.767.050	393.396.544	96.95
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.176.733.550	4.165.636.102	99.73
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.623.000	119.163.818	95.62
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	17.404.780.536	17.348.542.115	99.68
2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	15.271.773.536	15.228.655.315	99.72
4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.040.570.000	2.031.199.800	99.54
6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	88.937.000	85.372.000	96
14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000	3.315.000	94.71

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU,Perlengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik	60	50.76	84.6	2.040.570.000	2.031.199.800	99,54	0.85
		50	48.00	96	92.437.000	88.687.000	95,36	1.01
		60	60	100	15.271.773.536	15.228.655.315	99,72	1.00
2	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan	81,85	83.99	102.61	12.875.881.610	12.780.312.997	99,25	1.03

Uraian penjelasan tabel:

1. Untuk pencapaian sasaran 1 (satu) yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (PJU, Perlengkapan jalan dan kebutuhan fasilitas perhubungan lainnya) berfungsi dengan baik terealisasi anggaran sebesar **Rp 17.404.780.536** atau **99.54%** dari total pagu sebesar **Rp 17.910.575.666**.
2. Untuk pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan terealisasi anggaran sebesar **Rp 12.780.312.997** atau **99.25%** dari total pagu sebesar **Rp 12.875.881.610**.

Persentase efisiensi ini untuk 2 sasaran tersebut secara teori cukup memuaskan, sehingga dapat dirumuskan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024 Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS PERHUBUNGAN dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 DINAS PERHUBUNGAN menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar **95.89%** (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar **93.53%** (kategori sangat tinggi)
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar **102.61%** (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp 30.280.662.146**

sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp 30.128.855.112**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar **99.50%**

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS PERHUBUNGAN ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS PERHUBUNGAN kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

